



Merayakan Inovasi Daerah

Muhtar Haboddin¹

Abstrak

Makalah ini sengaja mengangkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi pemerintahan. Berbagai terobosan dan inovasi sudah dihasilkan oleh pemimpin daerah. Kesemua terobosan dan inovasi itu sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan, baik dari lembaga pemerintah, lembaga donor maupun lembaga swasta. Apresiasi dan penghargaan berbagai lembaga merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam merayakan dan membumikan terobosan dan inovasi yang *notabene* menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Keberhasilan ini merupakan cara kerja *governability*. Dalam perspektif *governability* memadukan antara kapasitas teknokratik dan kapasitas politik dalam mendorong inovasi dalam bentuk perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata kunci: *inovasi, pemerintahan daerah, dan governability*

Abstract

This paper deliberately highlights the success of local government oncreating governmental breakthrough and innovation. Various breakthroughs and innovations have been created by the local leaders. These breakthroughs and innovations has been appreciated and received awards not only from government agencies, but also donor and private agencies. Those appreciations and awards given by these various agencies/institutions shows the success of local government on celebrating and spreading both breakthroughs and innovations which aim to respond the needs and expectation of local communities. This success indicates how the governability works. In the perspective of governability, technocratic capacity and political capacity are combined to drive innovations in the various forms in order to enhance public services, create good governance, build capacity, and improve the welfare of local communities.

Keywords : *innovation, local government, and governability*

¹**Korespondensi:**

Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya
Gedung A Fisip Lt.2, Jl.Veteran Malang 65141
Email : muhtar_haboddin@ub.ac.id

Pendahuluan

Masuk dan menyebarnya inovasi ke dalam suatu sistem sosial biasa melalui anggota sistem secara individual, atau secara kolektif atau melalui otoritas pemimpin sistem. Jalan manapun yang ditempuh, masuknya arus inovasi itu lewat proses keputusan politik.

Rogers dan Shoemaker, 1981, 33

Kutipan ini sengaja dihadirkan sebagai pintu masuk dalam memahami inovasi pemerintahan daerah. Sebagaimana ditulis Rogers dan Shoemaker, *jalan manapun yang ditempuh, masuknya arus inovasi itu lewat proses keputusan politik*. Proses politik memang sangat diperlukan, tetapi perlu ditopang dengan proses teknokrat. Memadukan antara proses politik dan teknokrat telah melahirkan sejumlah terobosan dan inovasi pemerintahan. Karena itu, kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan reformasi pemerintahan dan politik desentralisasi telah banyak menghasilkan “cerita sukses” pemerintah daerah dalam melakukan inovasi pemerintahan. Sejumlah laporan penelitian, buku, hasil liputan majalah maupun media massa mengumandangkan perjalanan inovasi pemerintah daerah beberapa tahun terakhir. Sebagai ilustrasi Tim AKATIKA-Bandung pada tahun 2012 mempublikasikan hasil penelitiannya di lima Kab/kota yang berhasil melakukan inovasi pemerintahan. Sementara, Tim Transformasi pada tahun 2014 berhasil mencatat 99 inovasi pelayanan publik di sejumlah daerah Indonesia.

Dua temuan tersebut, menunjukkan penyebaran virus inovasi di sejumlah daerah. Penyebaran inovasi ini merupakan “petanda” baik dalam tata-kelola pemerintah daerah. Dikatakan baik, karena inovasi pemerintah merupakan bukti bekerjanya pemerintah secara kreatif dan inovatif dalam melakukan sejumlah terobosan baru yang ujung akhirnya menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Misalnya, sejumlah kepala daerah sukses dalam “upaya pengembangan perbaikan layanan dasar. Sebagian kepala daerah yang lain, mampu meningkatkan penguatan kapasitas warganya sekaligus meningkatkan pengembangan ekonomi lokal yang berpihak pada kelompok miskin.” (Tim AKATIKA, 2012 : 1).

Penggalan kutipan di atas memperlihatkan usaha pemerintah daerah yang baik dalam melakukan inovasi ataupun terobosan, baik dalam bidang layanan publik, penguatan kapasitas warga, dan pengembangan ekonomi. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan inovasi merupakan kajian baru yang seharusnya didalami secara mendalam oleh ilmuwan pemerintahan. Mengapa? Karena studi inovasi pemerintah di tingkat daerah sudah banyak dilakukan ilmuwan di luar pemerintahan, lembaga donor, dan penggiat masyarakat sipil. Karena itu, tulisan ini merupakan bentuk awal dalam meramalkan studi inovasi

pemerintahan daerah dengan menggunakan pendekatan *governability*. Pendekatan *governability* diharapkan mampu menganalisa keberhasilan inovasi pemerintahan daerah. Sebab keberhasilan inovasi daerah merupakan bukti kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan mengelola sumberdaya lokal sendiri sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat lokal.

Memahami Inovasi dalam Kerangka *Governability*

Secara sederhana inovasi pemerintahan dimaknai sebagai “bentuk penemuan baru, baik itu berupa gagasan-gagasan, tindakan baru, ataupun terobosan baru yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan”(Rogers, 1981:7). Inti dari definisi ini adalah inovasi selalu mengandung hal-hal baru dalam pemerintahan yang berujung pada perubahan dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Tetapi, pendapat lainnya mengatakan inovasi adalah bentuk “terobosan atau kreasi baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan strategi dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi dan layanan publik yang baik kepada masyarakat”(Eko, 2013:62).

Dua pendapat ini saling melengkapi dalam memberikan pemaknaan inovasi pemerintahan. Dalam inovasi pemerintahan sudah pasti terkandung ide ataupun gagasan baru, dan juga terdapat terobosan baru dalam memperbaiki kinerja organisasi pemerintah dalam memberikan layanan publik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan dalam memperbaiki kinerja pemerintahan melalui ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi secara baik. Penggunaan Ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi telah berhasil menciptakan dan menyebarkan aneka-ragam inovasi pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dapat menjangkau warganya secara luas dalam memberikan layanan publik.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan layanan publik merupakan bagian penting dari cara bekerjanya *governability*. Secara sederhana *governability* bisa didefinisikan sebagai “kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan regulasi”(Eko, 2013:65). Inti dari definisi, hanya melihat cara bekerjanya *governability* dalam fungsi pelayanan dan regulasi. Definisi ini tentu belum cukup dalam memotret *governability* yang memiliki cakupan inovasi beranekaragam dalam tata kelola pemerintahan daerah. Keterbatasan definisi *governability* ini, memaksa penulis untuk berpaling pendapat Pratikno dan Cornelis Lay. Menurutnya, *governability*:

Kapasitas pemerintah untuk mengelola dan menyediakan barang-parang politik (political goods). Dalam terminologi politik, political goods adalah keamanan, pelayanan publik, tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi antara masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif, dan tersedianya ruang publik bagi masyarakat (Pratikno dan Lay, 2007:4).

Pratikno dan Lay ingin mengatakan bahwa *governability* menyangkut kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan *political goods*. *Political goods* bila dicermati secara kritis merupakan fungsi dasar pemerintahan bila mengikuti cara berpikir Anthony Giddens (Giddens, 1999:54). Karena merupakan fungsi dasar pemerintah, maka pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam bertindak. Secara teoritik ada lima bentuk kapasitas pemerintah daerah. *Pertama*, kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memobilisasi berbagai sumberdaya maupun mengembangkan potensi lokal. *Kedua*, kapasitas regulatif, yakni kemampuan pemerintah daerah merumuskan kerangka aturan main terhadap pengelolaan otonomi daerah yang sesuai dengan preferensi lokal.

Ketiga, kapasitas distribusi, yaitu kapasitas pemerintah daerah dalam membagi kekuasaan, peran, tanggungjawab, dan sumberdaya kepada seluruh *stakeholders* di daerah. *Keempat*, kapasitas responsif, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan cara pandang, kondisi serta aspirasi dan preferensi masyarakat lokal. *Kelima*, kapasitas *linkage*, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan jaringan, kerjasama atau kemitraan secara lokal, nasional maupun internasional, guna mendukung kapasitas-kapasitas lainnya (Eko, 2013:170).

Lima bentuk kapasitas ini memperkuat kelembagaan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi, baik dalam bentuk layanan publik, penguatan kapasitas warga, peningkatan ekonomi masyarakat, dan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Capaian inovasi ini merupakan bentuk operasionalisasi *governability*. Bila mencermati cara kerja *governability* dalam proses menghasilkan inovasi daerah terungkap perpaduan antara kapasitas teknokratik dan kapasitas politik seorang pemimpin kepada daerah dalam mengelola manajemen pemerintahan. Memadukan kapasitas teknokratik yang terdiri dari keahlian, profesionalisme, keterampilan, dan kinerja perlu ditopang dengan kapasitas politik seorang pemimpin. Singkat kata, cara kerja *governability* dalam inovasi pemerintahan daerah mengandung politik dan manajemen. Politik berkaitan dengan legitimasi, dan manajemen berkaitan dengan kinerja. Dengan kata lain, inovasi pemerintahan daerah

membutuhkan legitimasi politik, dan legitimasi politik membutuhkan kinerja yang baik bagi seorang pemimpin daerah (Eko, 2013:66).

Merayakan Inovasi Daerah

Pendekatan *governability* yang memadukan kapasitas manajerial dan kapasitas politik telah berhasil membawa cerita sukses jumlah kepala daerah dalam melakukan inovasi pemerintahan. Pendekatan *governability* digerakkan ‘dari dalam’ oleh keahlian para birokrat profesional dan di topang secara penuh oleh kemauan politik dari seorang pemimpin dalam melakukan inovasi dan terobosan dalam kerangka mendekatkan pemerintah dalam kehidupan masyarakat lokal. Mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat, melalui sejumlah terobosan dan inovasi daerah yang kesemuanya lahir dari pembacaan pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Sensitifitas sejumlah pemerintah daerah dalam mengartikulasi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hasil riset yang dilakukan Tim AKATIKA, Bandung di lima Kab/Kota bisa rangkum pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Bentuk Inovasi Pemerintah

Daerah	Sektor Inovasi
Kota Surakarta	Partisipasi
	Pengembangan ekonomi kecil
	Pendidikan dan Kesehatan
	Reformasi birokrasi
	Ketegasan Pemerintah
Kota Kebumen	Membangun Gerakan
	Partisipasi
	Alokasi dan dana desa
	Penguatan dan kapasitas warga
Kota Banda Aceh	Ketegasan Pemimpin
	Reformasi pemerintah
	Partisipasi perempuan
Kota Pare - Pare	Pagu anggaran wilayah
	Penguatan kapasitas warga
Kota Lombok Utara	Kesehatan untuk kaum miskin
	Kejelasan prioritas dan target

Sumber : Tim AKATIKA, Tantangan Berinovasi dalam Era Desentralisasi, Bandung, AKATIKA dan Uni Eropa, 2012, hlm. 12-48

Tabel 1.1. menunjukkan ada lima daerah yang berhasil melakukan inovasi daerah. Dari lima daerah tersebut Kota Surakarta yang paling banyak melakukan inovasi daerah yakni 5 sektor, kemudian disusul Kab Kebumen, 4 sektor. Selanjutnya, Kota Banda Aceh tiga sektor, sementara Kota Pare-Pare dan Kab Lombok Utara masing-masing 2 sektor yang diinovasi. Dari lima Kab/Kota tersebut, sektor yang inovasi adalah pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, membangun gerakan, alokasi dana desa, partisipasi perempuan, penguatan kapasitas warga, dan ketegasan pemimpin daerah dalam mengelola pemerintah.

Selain hasil temuan dari Tim AKATIKA, Majalah *Tempo*, Edisi, 10-16 Desember 2012 melansir keberhasilan tujuh pemimpin daerah yang berhasil melakukan inovasi dan terobosan dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Bahkan, Majalah *Tempo*, secara khusus memilih tujuh kepala daerah ini dengan judul yang sangat bombastis: Bukan Bupati Biasa. Siapa dan apa yang diinovasi ketujuh pemimpin daerah ini bisa dilihat pada tabel 1.2.

Tabel. 1.2 Tujuh Terobosan Inovatif Pemda

Daerah	Sektor Inovasi
Kota Surabaya	Pertumbuhan ekonomi
	Indeks Pembangunan Manusia
	Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Keerom	Pertumbuhan Ekonomi
	Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Enrekang	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Indeks Pembangunan Manusia
	Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahunto	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Indeks Pembangunan Manusia
	Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kubu Raya	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Indeks Pembangunan Manusia
	Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Wonosobo	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Indeks Pembangunan Manusia
Kota Banjar	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Indeks Pembangunan Manusia
	Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Majalah Tempo, Bukan Bupati Biasa, Edisi 10-16 Desember 2012

Tabel 1.2. menampilkan tujuh pemimpin daerah—yang menurut liputan *Tempo* sebagai pemimpin yang kuat, berani dalam mengimplementasikan program, serta konsisten dalam berjuang menangani masalah rakyat secara cepat. Bila diperhatikan sektor yang berhasil diinovasi oleh tujuh pemimpin daerah tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan anggaran pendapatan, dan belanja daerah. Dari tujuh pemimpin daerah, enam kab/kota yang berhasil menginovasi tiga sektor tersebut, sementara

Kab Wonosobo hanya mampu menginovasi dua sektor yakni anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta indeks pembangunan manusia.

Bila dijumlah daerah yang berhasil melakukan inovasi daerah pada tahun 2012 sebagaimana nampak pada tabel 1.1. dan 1.2. jumlahnya sebanyak 11 kab/kota. Jumlah ini terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan dinamika politik lokal. Riset yang dilakukan The Jawa Post Institute of Pro-Otonomi (JPIP) berhasil mengungkap sembilan terobosan inovasi yang terjadi di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Sembilan Terobosan Inovatif di Kalbar

Daerah	Fokus Inovasi
Kabupaten Sangau	Bidang pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kubu Raya	Pemerataan ekonomi
Kabupaten Sambas	Pemberdayaan ekonomi
Kabupaten Landak	Pelayanan kesehatan
Kayong Utara	Bidang pendidikan
Kabupaten Bengkayang	Pelayanan administrasi
Kota Pontianak	Akuntabilitas publik
Kabupaten Sintang	Partisipasi publik
Kabupaten Ketapang	Bidang pengelolaan lingkungan sampah

Sumber : Budi Darma dkk, Mengapresiasi Inovasi, Surabaya, JPIP, 2012, VII

Menarik Tabel 1.3 menunjukkan virus penyebaran inovasi di Kalimantan Barat. Sembilan kab/kota yang ditampilkan di atas menampilkan model inovasi daerah yang berbeda-beda. Bila dipilah secara sederhana terdapat tujuh terobosan inovasi pemerintah daerah, yakni bidang ekonomi, pelayanan ekonomi, pelayanan kesehatan, bidang pendidikan, layanan administrasi, akuntabilitas publik, partisipasi publik, dan pengelolaan lingkungan sampah. Terobosan inovasi daerah ini tentunya memberikan angin segar dalam tata-kelola pemerintah daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan terobosan dan inovasi pemerintah daerah di Indonesia bergulir secara cepat dan merata. Hal ini diperkuat dengan studi inovasi pemerintah daerah yang dilakukan jaringan antar universitas Fisipol UGM. Hasilnya sangat menggembirakan karena ikut meramaikan wacana inovasi pemerintah daerah. Secara garis besar inovasi pemerintahan daerah yang dilakukan Fisipol-UGM bisa dikelompokkan menjadi empat sektor utama. Untuk lebih jelasnya tabel 1.4.

Tabel 1.4 Sektor Inovasi Pemerintahan Lokal

Sektor	Fokus Inovasi	Jumlah
Pendidikan	Biaya operasional satuan pendidikan	10
	Manajemen berbasis sekolah	10
	Distribusi guru	3
Kesehatan	ASI Eksklusif	11
	Persalinan aman	20
Ekonomi	Penyerdehanaan Perijinan	18
Tata Kelola Pemerintah	Pengaduan Masyarakat	8
	Forum Warga	3
Jumlah		83

Sumber : <http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/beranda>, diakses tanggal 27 Agustus 2015

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa sebanyak 83 Inovasi pemerintahan daerah. Jumlah ini bila dirinci sebanyak 31 di sektor kesehatan, 23 di sektor pendidikan, 18 di sektor ekonomi, sisanya 11 disektor tata-kelola pemerintahan. Bila ditotal dari tabel 1 sampai tabel 4 jumlah inovasi pemerintah daerah sebanyak 104 dalam rentang waktu 2012-2015. Angka ini akan terus bertambah, karena inovasi pemerintahan daerah sangat dinamis dan sangat tergantung dengan komitmen politik pemimpin lokal dalam membangun daerahnya.

Dinamisasi perkembangan inovasi pemerintahan daerah sebagaimana dipaparkan di atas memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang bisa ditarik adalah *pertama*, para pemimpin daerah melakukan apa yang memang dipikirkan dan diharapkan warganya. Hal yang menjadi perhatian itu, antara peningkatan akses kesehatan, pendidikan, layanan publik, penguatan kapasitas warga, peningkatan ekonomi dan seterusnya. Kelebihan para pemimpin daerah tersebut adalah mereka melaksanakan semua inovasi tersebut dengan konsisten dan sistematis.

Kedua, para pemimpin daerah turun langsung untuk membuat kesepakatan dengan rakyat. Para pemimpin daerah seperti Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kab Kebumen, Kota Pontianak, Kab Sintang, Kota Pare-pare, dan Kota Banda Aceh turun tangan menemui warganya. Mereka melakukan ini semua dalam kerangka mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan temuan inilah, para pemimpin daerah membuat teorbosan baik dalam bentuk penguatan kapasitas warga maupun pelibatan kaum perempuan dalam proses politik di pemerintahan.

Ketiga, sebanyak 104 daerah yang melakukan inovasi pemerintahan merupakan bukti bahwa para pemimpinnya memiliki komitmen politik dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah secara tegas. Prioritas pembangunan daerah selalu berpijak pada kebutuhan masyarakat daerah. Gaya kepemimpinan ini disebut dengan “pemimpin yang tak puas dengan laporan di atas kertas merupakan karakter yang dibutuhkan untuk mengetahui dan menuntaskan persoalan nyata dalam masyarakat”(Kompas, 2014).

Keempat, pemimpin daerah maupun birokrasi daerah menyadari pentingnya penguatan kapasitas warga dan aparat guna mendorong keberhasilan inovasi di daerah (Tim Akatika, 2012:8). Inovasi yang berhasil dalam menguatkan masyarakat lokal terjadi di Kab Kebumen, Kota Pare-pare, Kab Lombok Utara, Kab Sambas, Kab Sanggau, Kab Kubu Raya, Kota Surabaya, Kota Sawahlunto, Kota Banjar, dan Kab Enrekang.

Empat poin suda cukup untuk menggambarkan kesamaan pemerintah daerah lama merayakan inovasi daerah. Keberhasilan daerah dalam melakukan sejumlah inovasi merupakan bukti bahwa daerah telah memiliki stok pemimpin yang layak dibanggakan, diapresiasi, dan perhitungkan dalam panggung politik. Dari 104 kepala daerah yang berhasil menuliskan cerita sukses adalah

Mereka yang banyak tersembunyi dari halaman muka media massa nasional. Wilayah yang mereka pimpinpun jauh dari gemerlap Jakarta. Tapi gagasan dan tindakan 104 kepala daerah ini telah menumbuhkan inspirasi. Bahkan, mereka telah berhasil menyalahkan lilin dari daerahnya masing-masing. Cerita sukses mereka telah mengajarkan bahwa ‘cerita baik’ bisa menjadi berita yang bagus bagi pemimpin daerah (Tempo, 2012).

Menyebarkan Virus Inovasi

Rangkain terobosan dan inovasi daerah terus terjadi, diproduksi, dan tersebar di sejumlah kab/kota di Indonesia. Arus penyebaran inovasi daerah terjadi dari Sabang sampai Mauroke. Dari Kota Banda Aceh hingga Keerom, provinsi Papua. Penyebaran inovasi daerah ini merupakan capaian atas pelaksanaan politik desentralisasi. Dalam konteks desentralisasi, sebagian kepala daerah sedang memamerkan keahlian teknokratnya dan keberhasilannya dalam memimpin daerahnya. Para pemimpin daerah sedang berlomba-lomba melakukan proses *reinvention* pelayanan publik dengan melembagakan praktek-praktek inovatif dan bekerja dalam kerangka kerjasama yang lebih dekat dengan seluruh aktor yang ada dalam masyarakat sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjangkau seluruh warganya (Hanif dan Martanto, 2005:10).

Paralel dengan penjelasan di atas, proses penyebaran inovasi daerah terus berlangsung dan berkembang. Inovasi dan terobosan mengalami perluasan pada sektor pelayanan publik, di mana pelayanan tidak hanya berfokus pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan layanan kepada masyarakat. Inovasi pemerintahan daerah juga menitikberatkan upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai subjek yang “dilayani” bukan “melayani” birokrasi (Haboddin, 2014:155).

Perubahan paradigma pemerintahan daerah dalam memposisikan “rakyat” merupakan terobosan dan inovasi pemerintahan. Menempatkan “rakyat sebagai subyek” berarti memberikan penghargaan kepadanya, mengingat rakyat adalah pemegang kekuasaan. Karena itu, kekuasaan kepada daerah harus *diabdikan* kepada masyarakat. Selain karena perubahan paradigma pemerintahan, patut pula dicatat bahwa keberhasilan sejumlah kepala daerah dalam melakukan inovasi pemerintahan lebih disebabkan karena kemampuan manajemen dan kepemimpinan seorang kepala daerah. Artinya, inovasi dan terobosan yang selama ini berjalan dan mendapat pengakuan, baik dari lembaga donor, pemerintah, masyarakat sipil maupun lembaga swasta. Kerja keras dan kemampuannya membaca keinginan dan kebutuhan masyarakat menempatkan dirinya sebagai “pemimpin yang bekerja untuk rakyat”. Pemimpin yang memiliki komitmen dalam membangun masyarakat dan daerahnya sejajar dengan daerah lain. Bahkan, pada level tertentu menjadi pemimpin terdepan dalam melakukan inovasi pemerintahan.

Jenis pemimpin ini disebut ‘pemimpin responsif’. Dalam terminologi Majalah **TEMPO** edisi Desember 2008 disebut “Pemimpin bekerja dengan Hati menggerakkan daerah” sedangkan Laporan **KOMPAS**, 10 Desember 2014 menyebutnya: “pemimpin fenomenal dan pemimpin untuk rakyat”. Predikat ini merupakan pengakuan atas inovasi yang sudah dipersembahkan kepada warganya. Memberikan predikat dan menghargai kerja kepala daerah atas semua capaian yang membanggakan merupakan keberhasilan dalam proyek pelaksanaan politik desentralisasi. Artinya, pemimpin yang mampu melakukan reformasi kelembagaan, inovasi dalam layanan publik serta mampu menggerakkan perekonomian daerah—yang ujung akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah merupakan salah satu tujuan dari politik desentralisasi.

Bekerja untuk rakyat dan memajukan daerah tidaklah mudah untuk diwujudkan dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Karena itu, munculnya sejumlah kepala daerah yang memiliki prestasi dan membanggakan layak untuk dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi ilmu pemerintahan. Kalau demikian argumennya, maka pengembangan kajian inovasi pemerintahan sangat diperlukan pada jurusan ilmu

pemerintahan ke depan. Mengapa? Karena kajian inovasi pemerintahan daerah sudah banyak dihasilkan oleh ilmuwan, lembaga donor, maupun masyarakat sipil. Itu artinya, kajian inovasi pemerintahan daerah sudah banyak dihasilkan, baik berupa buku, penelitian ilmiah maupun jurnal ilmiah. Untuk menguatkan penjelasan ini simak kutipan berikut:

Signifikan pertumbuhan dan perkembangan angka terobosan dan inovasi pemerintah daerah juga diikuti dengan munculnya berbagai lembaga donor dengan tujuan utama berusaha untuk mengapresiasi hal tersebut. Berbagai lembaga donor berlomba-lomba melakukan serangkaian riset bahkan memberikan award pada inovasi yang dianggap mampu memberikan perubahan besar pada sektor pelayanan publik, tatakelola pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang dilakukan University Network for Governance Innovation (UNfGI) dengan menggandeng beberapa universitas negeri ternama (seperti UGM, Unair, Unhas, Unsyiah, dan Untan) untuk melakukan serangkaian riset serta menjaring best practice pelaksanaan inovasi di daerah. Di samping itu, terdapat beberapa penghargaan yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor serta kementerian seperti kementerian dalam negeri, BKPM Investment Award, Indonesia MDG Awards, Innovation Government Award, JPIP Otonomi Award, serta FIPO Otonomi Award. Seluruh program riset dan penghargaan yang diberikan lembaga-lembaga tersebut menjadikan terobosan dan inovasi terus berkembang dan menjadi primadoni pemerintah daerah (Haboddin, 2014:143).

Ada dua poin penting yang bisa ditarik dari kutipan di atas. *Pertama*, lembaga donor bermitra dengan universitas dalam melakukan riset inovasi daerah. Program riset ini menghasilkan sejumlah dokumen penting mengenai proses dan perkembangan inovasi daerah yang kesemuanya memberikan manfaat bagi pengkayaan pengetahuan, baik bagi pemerintah daerah maupun lembaga perguruan tinggi. Dalam konteks ini penguasaan ilmu pengetahuan yang berbasis riset merupakan kebutuhan bagi masyarakat maupun bangsa ini ke depan. *Kedua*, sejumlah lembaga negara maupun swasta memberikan apresiasi berupa *award* kepada pemerintah yang telah berhasil melakukan inovasi pemerintahan. Lembaga pemerintah maupun swasta yang memberikan *award* kepada daerah adalah Kementerian Dalam Negeri, BKPM Investment Award, Indonesia MDG Awards, Innovation Government Award, JPIP Otonomi Award, serta FIPO Otonomi Award.

Tantangan Inovasi Daerah

Inovasi daerah yang sudah menyebar begitu luas karena mendapat publikasi yang besar, baik dalam bentuk siaran langsung penerimaan penghargaan maupun berkembangnya publikasi hasil penelitian perihal terobosan dan inovasi telah memberikan implikasi yang baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Inovasi daerah telah direproduksi sedemikian rupa oleh para kepala daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini diparalelkan dengan komitmen politik dan keberpihakan kepala daerah kepada rakyat. Dalam pendekatan *governability* inovasi daerah merupakan wujud nyata dari bekerjanya kekuasaan untuk masyarakatnya.

Cara berpikir yang menempatkan *governability* akan terus memproduksi inovasi pada perkembangannya akan mengalami tantangan berat. Ada tiga tantangan pemimpin daerah dalam mengembangkan inovasi ke depan. *Pertama*, pergantian kepala daerah. Secara politis, pergantian kepala daerah merupakan proses alamiah dalam sistem pemerintahan demokratis. Namun, yang menjadi soal dalam pergantian kekuasaan di daerah adalah ganti pemimpin ganti program kerja. Pemimpin yang terpilih, selalu mencari program kerja baru dengan menelantarkan atau meninggalkan program yang sudah ada. Artinya, inovasi yang sudah berjalan akan ditinggalkan oleh kepala daerah yang baru. Hal ini sudah jamak terjadi. Kesenambungan dan keberlanjutan inovasi biasa akan “mati” di bawah kepala daerah yang baru. Karena itu kita mengenal istilah: ganti pemimpin, ganti program kerja.

Kedua, inovasi yang dihasilkan oleh kepala daerah sekedar pencitraan. Maksudnya, pemimpin kepada daerah tersebut mendapatkan penghargaan inovasi bukan karena prestasinya, tetapi “menyokok” penyelenggara. Sebagai ilustrasi, untuk mendapatkan “penghargaan tidak sedikit daerah yang mencoba menyuap Tim JPIP. Mereka beranggapan, Otonom Award yang diselenggarakan JPIP setiap tahun, sama dengan penghargaan lain yang bisa ditukar dengan konsesi lainnya” (Hanif dan Martanto, 2005:167).

Pengakuan ini menarik untuk disimak, karena kepala daerah mau mendapatkan penghargaan tanpa kerja keras. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghargaan akan selalu hadir menjelang pemberian Otonomi Award. Inilah tantangan terbesar bagi penyelenggara dalam rangka mendorong virus inovasi daerah ke depan. Ketegasan penyelenggara sangat diperlukan dalam menumbuh-kembangkan inovasi ke seluruh penjuru negeri ini. Nalar ini sejatinya dipegang bahwa langkah inovatif dan berbagai terobosan perlu dikedepankan bagi pemimpin daerah.

Ketiga, sejumlah kepala daerah yang inovatif akhirnya terkena tuduhan korupsi dan berurusan dengan penjara. Sebagai ilustrasi, Kab Jembrana, Garut dan Ciamis, yang

menjalankan kebijakan populis dan bentuk kesehatan gratis, akhirnya menderita kebangkrutan dana (Eko, 2013:60). Ketika kepala daerah berurusan dengan penjara disatu sisi, sementara pada sisi yang lain daerahnya mengalami kebangkrutan dana, maka ruang untuk melanjutkan program inovatif akan segera berakhir.

Catatan Akhir

Bahasa “inovasi” tiba-tiba memiliki roh dan kekuatan amat dahsyat dalam tata-kelola pemerintahan daerah. Inovasi pemerintahan daerah merupakan bahasa yang bukan saja populer sejak 10 tahun terakhir, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa dalam tata-kelola pemerintahan. Familiarisasi inovasi pemerintahan daerah benar-benar dirayakan seiring dengan semakin banyak kepala daerah yang berhasil melakukan inovasi. Keberhasilan inovasi pemerintahan daerah bisa dibaca dalam dua tafsir secara kritis dan argumentatif. *Pertama*, merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terdapat masyarakat. Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintah daerah yang baik, amanah, dan responsif. Penjelasan lainnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingan masyarakat.

Tafsir *kedua* inovasi sebagai bentuk keberhasilan seorang pemimpin daerah dalam memajukan daerah. Keberhasilan pemerintah daerah hadir di tengah pelaksanaan politik desentralisasi melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Logikanya adalah pemimpin yang dipilih secara langsung memiliki komitmen politik yang kuat dalam memajukan daerah dan warganya. Komitmen politik dari pemimpin beserta birokrasinya sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi berbagai inovasi daerah. Pemahaman sangat diperlukan karena sejumlah inovasi yang pernah ada dan berkembang, bisa saja “layu” dan “berguguran” ketika terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

Sebagai catatan akhir dari tulisan ini, ada baiknya mengutip laporan *Kompas*, “*produk inovasi pemerintahan Anda akan ditiru orang lain? Tak perlu emosi atau dendam karena itu adalah hal yang biasa terjadi dalam tata-kelola pemerintahan. Justru karena peristiwa ini, Anda perlu lebih terpacu untuk melakukan inovasi dan kreatif dalam menciptakan terobosan*” (Kompas, 2013). Kutipan ini menganjurkan kepada pemimpin daerah untuk selalu melakukan terobosan dan inovatif dalam mengelola pemerintahan daerah. Kreativitas dan menciptakan berbagai terobosan dalam tata-kelola pemerintahan daerah merupakan jawaban yang sangat diperlukan untuk menguatkan posisi daerah bila berhadapan dengan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sutoro (2003). *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. Jogjakarta: APMD.
- Eko, Sutoro (2013). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: IRE.
- Giddens, Anthony (1999). *The Third Way: Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Haboddin, Muhtar dkk (2014). *Terobosan Layanan Pemerintah Daerah*. Malang: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan.
- Hanif, Hasrul dan Ucu Martanto (ed) (2005). *Terobosan dan Inovasi Manajemen Pelayanan Publik*. Jogjakarta: Fisipol-UGM.
- Lihat, *Kompas*, 10 Juli 2013 .
- Lihat, *Kompas*, 18 Desember 2014 .
- Majalah *Tempo*, Bukan Bupati Biasa, Edisi, 10-16 Desember 2012.
- Pratikno dan Cornelis Lay (2007). *Bahan Ajar Politik Indonesia*. Jagjakarta, S2 Politik-Fisipol-UGM.
- Rogers, Everett M, dan F. Floyd Shoemaker (1981). *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Tim AKATIKA (2012). *Tantangan Berinovasi dalam Era Desentralisasi*, Bandung, AKATIKA dan Uni Eropa